

Kota Metro Raih Penghargaan Prevalensi Stunting Terendah dari BKKBN RI



Kota Metro kembali raih prestasi di kancah nasional atas diraihnya penghargaan Apresiasi Kabupaten/Kota Kategori Prevalensi Stunting Terendah pada Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 oleh BKKBN RI yang berlangsung di Merapi Ballroom, Semarang, (28/06/2024).

Penghargaan ini diselenggarakan dalam Rangka Perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31, yang bertujuan untuk meningkatkan peran keluarga Indonesia dalam pencegahan stunting serta mensinergikan langkah bersama para stakeholder dan tokoh masyarakat.

Bagi Kota Metro, penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat, stakeholder, organisasi wanita, PKK, swasta, komunitas hingga Forkopimda serta DPRD Kota Metro, dalam menurunkan prevalensi stunting.

“Karena target penurunan stunting ini sejalan dengan upaya menciptakan Kota Metro yang memiliki Generasi Emas Metro Cemerlang (Cemerlang), sesuai dengan program inisiatif Walikota Metro, Wahdi,” kata Kepala Dinas PPPA dan PPKB, Wahyuningsih.

Dalam kesempatan ini, Mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan RI yang diwakili oleh Sekretaris Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Oktaheroe Ramsi menegaskan bahwa Indonesia memiliki target ambisius untuk menjadi negara maju sebagai Indonesia Emas pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, perlu disusun strategi yang memperkuat sumber daya manusia Indonesia dengan kemampuan unggul dan karakter yang baik.

“Kita perlu menyusun strategi penyiapan sumberdaya manusia Indonesia dengan Key Performance yang unggul berdaya saing dan karakter yang baik. Dalam rangka menyiapkan generasi unggul keluarga sebagai entitas sosial terkecil dalam kehidupan masyarakat memiliki relevansi dan peran krusial dalam melahirkan sebuah generasi yang berkualitas,” ungkapnya.



Menyadari peran penting keluarga dalam membentuk generasi yang unggul, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dipercayakan untuk terus mendampingi keluarga dalam menjaga ketahanan keluarga yang sehat, produktif, dan berkualitas.

“Melalui pendekatan modern dan penggunaan teknologi digital sebagai sarana penyampaian informasi, BKKBN berharap dapat lebih efektif dan tepat sasaran dalam menyampaikan pesan-pesan penting terkait ketahanan keluarga,” ujar Oktaheroe Ramsi dalam sambutannya.

Sekretaris Ditjen Strahan Kemhan, Oktaheroe Ramsi berharap melalui kegiatan ini dapat berkomitmen bersama untuk menjalin sinergitas dan kolaborasi dalam meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuat pertahanan negara dalam rangka mewujudkan Indonesia emas 2045.

Kegiatan dilanjutkan dengan Pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN No. 124/Kep/G2/2024 Tentang Pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 oleh Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo.

Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo memberikan ucapan selamat atas prestasi yang diraih para kepala daerah yang menjadi contoh dan motivasi bagi wilayah masing-masing.

“Kami atas nama BKKBN mengucapkan selamat atas prestasi yang Bapak Ibu raih dan kemudian menjadikan contoh dan motivator di wilayah masing-masing,” ujar Hasto.

Hasto mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pemberian penghargaan penurunan stunting ini berfokus pada pembangunan SDM.

“Bersama-sama dengan Bapak Ibu yang di daerah, kami melakukan intervensi variable atau faktor-faktor yang efektif untuk mencegah lahirnya stunting baru. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), lahir prematur dan pengetahuan atau pendidikan ibu di luar dugaan kita,” Ungkap Hasto.

Dengan inovasi-inovasi yang luar biasa, kata Hasto, harapannya bisa menysasar pada faktor-faktor yang sensitif dalam rangka untuk menurunkan stunting maupun mempercepat kualitas SDM untuk menuju Indonesia Emas 2045.

“Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mungkin di mata bupati dan wali kota masih ada yang kurang pas karena penurunannya kecil tetapi hari ini di bawah pimpinan Menko PMK di bawah Wapres kita melakukan penimbangan dan pengukuran serentak dan berakhir di bulan juni ini,” papar Hasto.

Hasil dari pengukuran intervensi serentak ini akan dilakukan verval dengan basis data e-PPGBM untuk mencari jalan tengah agar angka yang dikumpulkan oleh Bupati dan Wali Kota melalui e-PPGBM itu juga mendapatkan suatu apresiasi sehingga kedepan bisa mendapatkan dengan validitas yang cukup baik tentunya yang bisa dipercaya bersama. (yus)